

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA



**RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH**

**TAHUN
2023**

 inspektorat_gowa

 gowainspektorat@gmail.com

 Jl. Tumanurung No.15, Sungguminasa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 06/SK/X/INSPEKTORAT/2022

TENTANG

RENCANA KINERJA (RENJA/RKT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, perlu disusun rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kinerja (Renja/RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagaimana terlampir, serta bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja (Renja/RKT) tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 2023
- KETIGA** : Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 06 Oktober 2022


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA,**
H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	34
2.3 ISU-ISU PENTING PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	36
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	42
2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	51
3.2 TUJUAN DAN SASARAN POKOK RENJA	53
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	62
BAB V PENUTUP	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021	6
Tabel 2.2. Program dan Indikator Program Tahun 2021	9
Tabel 2.3. Persentase Tindak Lanjut AFP Tahun 2021	11
Tabel 2.4. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Gowa Tahun 2021	13
Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa	22
Tabel 2.6. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Gowa	26
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan s/d Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	35
Tabel 2.8. Klasifikasi Jabatan/Eselon dan Umur Pegawai	41
Tabel 2.9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	44
Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	50
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	58
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	63



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Klasifikasi Jenjang Kepangkatan	41
Diagram 1.2. Klasifikasi Tingkat Pendidikan	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugasnya, disusun perencanaan 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 2021–2026, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja wajib dilaksanakan bagi OPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja OPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-OPD. Selanjutnya RKA-OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja disusun dengan maksud menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai



visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pokok Renja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan Inspektoraat Daerah Kabupaten Gowa tahu 2023

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang penutup Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa secara umum



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Gowa serta visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Untuk visi pembangunan Inspektorat Daerah mengikut dengan Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021 - 2026, yaitu:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN
TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**

MISI

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka didukung dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut:



- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
- b. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
- c. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan
- d. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien dengan fokus sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	3	100
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level	3	3	100

*sumber data: Laporan QA BPKP Perwakilan Sul-Sel



Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan penyusunan Renja tahun 2023 yaitu :

- a. Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan ketertiban pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Auditor melalui kegiatan diklat, pendidikan dan pelatihan.
- d. Mempertahankan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021 dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renja 2023 dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi Tahun 2023 yang diperkirakan dengan capaian Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka berikut ini hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2021:

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN	INDIKATOR KINERJA : Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
---	---

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Gowa diperoleh dari hasil penilaian Tim *quality assurance* BPKP terhadap 25 fokus maturitas yaitu lingkungan pengendalian (8 fokus), penilaian risiko (2 fokus), kegiatan pengendalian



(11 fokus), informasi dan komunikasi (2 fokus) dan pemantauan (2 fokus). Adapun simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 sesuai hasil *self assesment* dan telah dilakukan validasi oleh tim *quality assurance* BPKP berada pada level 3 atau "Terdefinisi". Tingkat maturitas "terdefinisi" secara umum menunjukkan praktik pengendalian telah terdokumentasi, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pada tahun yang sama yaitu 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah melakukan *self assesment* peningkatan Kapabilitas APIP ke level 3. Dari penilaian tersebut, dan telah dilakukan validasi oleh Tim *quality assurance* BPKP, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa memperoleh hasil level 3 yang berarti APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah melakukan *self assesment* terkait tingkat maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP. Hasilnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mampu mempertahankan tingkat maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP di level 3. Tim *quality assurance* BPKP dijadwalkan melakukan validasi terhadap hasil *self assesment* Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2021, tetapi karena kegiatan masih difokuskan pada bencana Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) beserta kegiatan vaksinasinya, sehingga validasi oleh Tim *quality assurance* BPKP belum dapat dilaksanakan. Sesuai informasi yang diberikan, BPKP telah merencanakan ulang akan melakukan validasi terhadap hasil *self assesment* Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait tingkat maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP pada tahun 2022.



Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh 3 (tiga) program, yang terbagi atas 2 (dua) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang.

Tabel 2.2
Program dan Indikator Program Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun Berkenaan
		Persentase Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Rata-Rata Capaian Sakip OPD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks RB pada Komponen Penguatan Pengawasan
		Persentase Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas
		Persentase ASN yang telah melaporkan LHK
		Persentase Pemenuhan MCP
		Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD
		Nilai SAKIP Inspektorat
		Persentase Pejabat Fungsional yang Bersertifikasi Sesuai Jenjang Kepangkatan
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program prioritas yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Persentase Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran atas kondisi keuangan maupun tolak ukur informasi dari sebuah pemerintah daerah. Banyak LKPD saat ini belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil



ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit LKPD.

Target	Realisasi	Capaian
95%	85%	89%

Persentase SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material diperoleh dari membandingkan antara jumlah SKPD yang memiliki temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Gowa yang bersifat material dengan jumlah seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Fokus dari Pemeriksaan BPK yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan oleh BPK di tahun 2021, terdapat 8 (delapan) SKPD dari 54 (lima puluh empat) SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki temuan bersifat material, diantaranya adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun Berkenaan

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Pengawas (AFP), baik rekomendasi dari BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sendiri.



Target	Realisasi	Capaian
75%	77%	103%

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) diperoleh dari membandingkan antara jumlah tindak lanjut yang dilakukan dengan jumlah rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan AFP BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan AFP yang dilakukan.

Dari total 313 rekomendasi yang ada pada tahun 2021, Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebanyak 241 rekomendasi. Berikut hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan AFP tahun 2021.

Tabel 2.3.
Persentase Tindak Lanjut AFP Tahun 2021

NO	AFP	JUMLAH REKOMENDASI	JUMLAH TINDAK LANJUT	PERSENTASE
1	BPK	88	48	54.55
2	BPKP	-	-	-
3	Itjen	-	-	-
4	Itprov	49	17	34.69
5	Itkab	176	176	100
TOTAL		313	241	77.00

*Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3) Persentase cakupan penyelesaian penanganan kasus pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat. Adapun pengaduan yang dimaksud adalah bersumber dari



lembaga negara, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa maupun perorangan.

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Persentase cakupan penyelesaian penanganan kasus pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh dari membandingkan antara jumlah pengaduan yang masuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan cakupan penyelesaiannya.

Jumlah pengaduan yang masuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sebanyak 18 pengaduan dari masyarakat. Dari Total 18 aduan yang masuk, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti dalam bentuk audit untuk menyelesaikan semua kasus pengaduan tersebut.

4) Rata-rata Capaian SAKIP OPD

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang secara sistematis, merupakan aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Olehnya itu setiap Instansi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan sebagai Pengguna Anggaran.

Untuk memberikan informasi tentang pencapaian indikator kinerja tentang sejauh mana terwujudnya SAKIP pada instansi pemerintah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP berdasarkan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan mampu menjadi koreksi bagi instansi Pemerintah Kabupaten untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diharapkan dalam RPJMD.

Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	100%

Evaluasi pengukuran indikator capaian kinerja, yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada OPD secara keseluruhan yakni 36 OPD ditambah 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa atau keseluruhan populasi, untuk tahun anggaran 2021 :

Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Gowa Tahun 2021

NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	INTERPRETASI
1	Sekda	82,34	A	Memuaskan
2	Sekwan	74,03	BB	Sangat Baik
3	Inspektorat	78,99	BB	Sangat Baik
4	Disdik	79,29	BB	Sangat Baik
5	Dinkes	70,27	BB	Sangat Baik
6	PUPR	72,76	BB	Sangat Baik
7	Perkimtan	72,31	BB	Sangat Baik
8	Dinsos	77,91	BB	Sangat Baik
9	Satpol PP	70,98	BB	Sangat Baik
10	Damkar	72,07	BB	Sangat Baik



NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	INTERPRETASI
11	Disnaker	72,48	BB	Sangat Baik
12	DPP & PA	76,52	BB	Sangat Baik
13	Ketapang	80,29	A	Memuaskan
14	DLH	72,06	BB	Sangat Baik
15	Dsidukcapil	74,17	BB	Sangat Baik
16	DPMD	79,35	BB	Sangat Baik
17	DPPKB	71,09	BB	Sangat Baik
18	Dishub	76,42	BB	Sangat Baik
19	Kominfo	77,45	BB	Sangat Baik
20	Dsikop UKM	73,65	BB	Sangat Baik
21	PTSP	72,28	BB	Sangat Baik
22	Dispora	73,51	BB	Sangat Baik
23	Perpustakaan	77,75	BB	Sangat Baik
24	Disperdastris	71,21	BB	Sangat Baik
25	Pariwisata	74,29	BB	Sangat Baik
26	DTPH	72,99	BB	Sangat Baik
27	Peternakan	78,25	BB	Sangat Baik
28	Perikanan	71,27	BB	Sangat Baik
29	BPKD	80,64	A	Memuaskan
30	Bapenda	80,67	A	Memuaskan
31	Bappeda	82,09	A	Memuaskan
32	BKPSDM	74,94	BB	Sangat Baik
33	Balitbang	73,06	BB	Sangat Baik
34	BPBD	73,86	BB	Sangat Baik
35	Bakesbang	72,03	BB	Sangat Baik
36	RSUD	71,99	BB	Sangat Baik
37	Sombaopu	71,79	BB	Sangat Baik
38	Pallangga	68,13	B	Baik
39	Bajeng	70,26	B	Baik



NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	INTERPRETASI
40	Bajeng Brt	74,24	BB	Sangat Baik
41	Bntnmpo	70,37	BB	Sangat Baik
42	Bonsel	74,71	BB	Sangat Baik
43	Barombong	66,82	B	Baik
44	Bomar	71,19	BB	Sangat Baik
45	Pattalassang	70,13	BB	Sangat Baik
46	Manuju	70,34	BB	Sangat Baik
47	Parigi	74,85	BB	Sangat Baik
48	Bungaya	65,50	B	Baik
49	Parangloe	70,12	BB	Sangat Baik
50	T.Moncong	73,30	BB	Sangat Baik
51	T.pao	68,23	B	Baik
52	T.bulu	68,85	B	Baik
53	Birbul	69,81	B	Baik
54	Botlem	70,28	BB	Sangat Baik
	Rata-rata	73,60	BB	Sangat Baik

*Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel diatas, realisasi capaian kinerja untuk tahun 2021 rata-rata mencapai nilai 73,60 dengan kategori BB atau "Sangat Baik". Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berupaya untuk tetap mendorong peningkatan kinerja OPD dengan memberikan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait dengan implementasi SAKIP, serta bagi pimpinan OPD agar berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan selanjutnya.



b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Indeks RB pada Komponen Penguatan Pengawasan

Salah satu sasaran prioritas nasional dalam visi Indonesia Maju, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Sentul 14 Juli 2019, yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 8 Komponen pada Indeks RB, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Target	Realisasi	Capaian
4%	-	-

Untuk realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan tahun 2021 belum dapat disajikan disebabkan data tersebut merupakan data eksternal yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, sampai saat penyelesaian Laporan Kinerja ini, laporan Kemenpan-RB belum *release/terbit*.



2) Persentase Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah melakukan pendampingan pada unit kerja dalam rangka pembangunan ZI, dan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mengusulkan 1 (satu) unit kerja yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai calon unit kerja layanan berpredikat menuju WBK.

Target	Realisasi	Capaian
15%	-	-

Persentase unit kerja yang dibangun ZI diperoleh dari membandingkan antara jumlah unit kerja yang disetujui untuk dilakukan desk evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan jumlah unit kerja yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Pada tahun 2021, unit kerja yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai calon unit kerja layanan berpredikat menuju WBK, belum dilakukan desk evaluasi oleh Kemenpan-RB, sehingga indikator untuk Persentase unit kerja yang dibangun ZI belum dapat diukur.

3) Persentase ASN yang telah melaporkan LHK

Laporan Hasil Kekayaan (LHK) adalah bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan Integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk membatasi ruang gerak ASN untuk melakukan praktek korupsi. Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktek korupsi di lingkungan ASN telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di awal tahun 2015 yaitu Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya.

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Persentase ASN yang telah melaporkan LHK diperoleh dari membandingkan antara jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang telah melaporkan LHKnya dengan jumlah seluruh ASN



yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Jumlah keseluruhan ASN yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2021 adalah sebanyak 49 ASN. Dimana sebanyak 5 ASN melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan sebanyak 44 ASN lainnya melaporkan harta kekayaannya pada LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).

4) Persentase Pemenuhan MCP

MCP atau *Monitoring Center for Prevention* merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah.

MCP sendiri meliputi 8 area intervensi yaitu, manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Target	Realisasi	Capaian
80%	65.02%	81,27%

Persentase pemenuhan MCP diperoleh dari agregasi 8 area intervensi. Pada aplikasi MCP, Kabupaten Gowa sendiri memperoleh total capaian 65,02%, dengan capaian masing-masing intervensi yaitu area Perencanaan dan Penanganan APBD dengan skor 35,93%, area Pengadaan Barang dan Jasa dengan skor 70,8%, area Perizinan dengan skor 91,27%, area Pengawasan APIP dengan skor 63,07%, area Manajemen ASN dengan skor 69,03%, area Optimalisasi Pajak Daerah dengan skor 73,24%, area



Manajemen Aset Daerah 69,15%, dan area Tata Kelola Keuangan Daerah dengan skor 61,75%.

5) Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Baik WBK maupun WBBM tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Target	Realisasi	Capaian
1 Unit Kerja	-	-

Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM diperoleh dari membandingkan antara jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dengan jumlah unit kerja yang ditargetkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Karena unit kerja yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai calon unit kerja layanan berpredikat menuju WBK, belum dilakukan desk evaluasi oleh Kemenpan-RB, sehingga di tahun 2021 ini, belum ada unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memperoleh predikat WBK/WBBM.



Secara umum PKPT tahun 2021 dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 100 persen sesuai yang direncanakan, meskipun masih memiliki kendala yaitu kesiapan dari objek pemeriksaan, yang telah di jadwalkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam PKPT tahun 2021, namun kendala tersebut tidak cukup berimplikasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gowa, maka Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan capaian strategis di tahun 2023 sebagai upaya untuk mengantisipasi kendala yang berimplikasi pada capaian kinerja yang tidak optimal maka perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan *consulting* serta *quality assurance* dengan mendorong pengembangan kemampuan dan pemahaman APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait *risk management* (manajemen risiko) dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengikuti berbagai pelatihan *risk management*.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminstrasi yang memadai	-	100%	100%	97%	97%	-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan listrik/air yang tersedia	-		2 jaringan	2 jaringan	100%	-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas	-		4 kali/tahun	4 kali/tahun	100%	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	-		170 buah	170 buah	100%	-	-	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan & bahan pemebersih	-		41 buah	41 buah	100%	-	-	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	-		17 buah	14 buah	82%	-	-	-
	Penyediaan jasa administrasi pelaporan hasil pengawasan	Jumlah penerima honorarium jasa administrasi pelaporan hasil pengawasan	-		6 org	6 org	100%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Jumlah penerima honorarium jasa administrasi ketatausahaan	-		10 org	8 org	100%	-	-	-
		Jumlah surat keluar	-		831 surat	627 surat	75%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang memadai	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas	-		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-		53 unit	53 unit	100%	-	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-		41 unit	41 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor	-		2 kali/tahun	2 kali/tahun	100%	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	-		43 unit	43 unit	100%	-	-	-
	Program peningkatan disiplin aparatur	Peresntase keseragaman pakaian aparatur	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan mesin / kartu absensi	Jumlah mesin / kartu absensi	-		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	-		35 stel	35 stel	100%	-	-	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-		35 stel	35 stel	100%	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan program kerja pengawasan tahunan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	-		1 Lap.	1 Dok.	100%	-	-	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-		1 Lap.	1 Dok.	100%	-	-	-
	Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran	-		3 Dok.	3 Dok.	100%	-	-	-
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pertumbuhan kasus kerugian Negara/Daerah	-	253,85%	7,52%	-	-	-	-	-
		Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi AFP pada setiap tahun berkenaan	-	50,90%	72%	6780%	9417%	-	-	-
		Opini BPK atas LKPD Kab. Gowa	-	WTP	WTP	-	-	-	-	-
		Persentase SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset, yang material	-	96,3%	95%	87%	91,58%	-	-	-
		Persentase Sekolah, Puskesmas dan Desa yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan, yang material	-	-	93%	93%	100%	-	-	-
		Nilai EKPPD Pemerintah Kab. Gowa	-	-	Sangat tinggi	-	-	-	-	-
		Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Gowa	-	-	B	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai dan Perceraian	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase unit kerja yang dibangun Zona Integritas	-	-	15%	15%	100%	-	-	-
	Pemeriksaan reguler SKPD kabupaten	Jumlah SKPD yang diperiksa	-		-			-	-	-
	Pemeriksaan reguler sekolah dan puskesmas	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	-		16 LHP	16 LHP	100%	-	-	-
	Pemeriksaan reguler desa	Jumlah desa yang diperiksa	-		121 Desa	121 Desa	100%	-	-	-
	Reviu pelaporan kabupaten	Jumlah laporan hasil reviu	-		10 LHR	10 LHR	100%	-	-	-
	Pengawasan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	-		10 LHP	10 LHP	100%	-	-	-
	Evaluasi dan monitoring	Jumlah SKPD yang di evaluasi/monitoring	-		54 SKPD	54 SKPD	100%	-	-	-
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus	-		69 LHP	69 LHP	100%	-	-	-
	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	-		250 Reko mendasi	134 Reko mendasi	54%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Frekuensi koordinasi pengawasan	-		2 kali/tahun	2 kali/tahun	100%	-	-	-
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah peserta rapat evaluasi berkala hasil pengawasan	-		90 org	81 org	90%	-	-	-
	Pendampingan dan asistensi aparat fungsional pengawas internal/eksternal	Frekuensi pendampingan/asistensi AFP	-		5 kali/tahun	4 kali/tahun	80%	-	-	-
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Pejabat fungsional yang bersertifikasi	-	69%	81%	74%	91%	-	-	-
		Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik dan Disiplin PNS	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah kepesertaan mengikuti diklat/sosialisasi fungsional aparat pengawasan	-		4 org	4 org	100%	-	-	-
	Pelatihan teknis pengawasan (in house training)	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-		120 org	120 org	100%	-	-	-
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	Jumlah daftar usulan PAK yang dinilai	-		16 Dupak	16 Dupak	100%	-	-	-



Terdapat perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kinerja tahun 2021, yang semula klasifikasi hanya terbagi menjadi Program dan Kegiatan seperti yang diatur pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut



Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2022
Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	-	-	-	-	100%	98%	98%
		NILAI SAKIP INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	BB	BB	100%
		PERSANTASE PEJABAT FUNGSIONAL YANG BERSERTIFIKASI SESUAI JENJANG KEPANGKATAN	-	-	-	-	-	85%	87%	102%
		PERSENTASE KESESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN	-	-	-	-	-	100%	92%	92%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen		-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		-	-	-	4 kali/tahun	4 kali/tahun	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen		-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen		-	-	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya	9 jenis		-	-	-	9 jenis	9 jenis	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Honorarium Jasa Administrasi	56 Orang		-	-	-	56 Orang	56 Orang	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis		-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	89%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	110 Stel		-	-	-	90 Stel	90 Stel	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kepesertaan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang		-	-	-	156 Orang	105 Orang	67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis		-	-	-	7 Jenis	7 Jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis		-	-	-	11 Jenis	11 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Diadakan	20 Jenis		-	-	-	26 Jenis	26 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	16650 Lembar		-	-	-	16650 Lembar	16650 Lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan	6 Buah		-	-	-	6 Buah	6 Buah	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	14 Kali		-	-	-	14 Kali	14 Kali	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Jumlah rapat/ koordinasi yang diikuti	- 336 Orang - 12 kali		-	-	-	- 336 Orang - 12 kali	- 336 Orang - 12 kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	36 Unit		-	-	-	36 Unit	36 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	26 Unit		-	-	-	36 Unit	36 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Jaringan		-	-	-	2 Jaringan	2 Jaringan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan listrik/air yang tersedia	2 Jaringan		-	-	-	2 Jaringan	2 Jaringan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis		-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	10000%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit		-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung terpelihara	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	30 Unit		-	-	-	35 Unit	35 Unit	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	-	-	-	-	95%	85%	89%
		PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (INTERNAL/EKSTERNAL) SETIAP TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	75%	77%	103%
		PERSENTASE CAKUPAN PENYELESAIAN PENANGANAN KASUS PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
		RATA-RATA CAPAIAN SAKIP OPD	-	-	-	-	-	BB	BB	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis		-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	12 LHP		-	-	-	12 LHP	12 LHP	100%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	15 LHP		-	-	-	15 LHP	15 LHP	100%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR Lap. Kinerja	3 LHR		-	-	-	3 LHR	3 LHR	100%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR Lap. Keuangan	19 LHR		-	-	-	19 LHR	19 LHR	100%
	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Desa	30 LHP		-	-	-	30 LHP	30 LHP	100%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (Internal/Eksternal)	2 Perjanjian		-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	75 Reko mendasi		-	-	-	75 Reko mendasi	75 Reko mendasi	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis		-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu	52 LHP		-	-	-	52 LHP	52 LHP	100%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA KOMPONEN Penguatan PEGAWASAN	-	-	-	-	-	4%	-	
		PERSENTASE UNIT KERJA YANG DIBANGUN ZONA INTEGRITAS	-	-	-	-	-	15%	-	
		PERSENTASE ASN YANG TELAH MELAPORKAN LHK	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
		PERSENTASE PEMENUHAN MCP	-	-	-	-	-	80%	65,02%	81,27%
		JUMLAH UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM	-	-	-	-	-	1 Unit Kerja	-	-
		PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	65%	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Money PPK dan Hasil SPI	3 Laporan		-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan AFP (internal/eksternal)	2 Kali		-	-	-	2 Kali	2 Kali	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah unit kerja yang dilakukan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	54 Unit Kerja		-	-	-	8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	100%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah unit kerja yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	9 Unit Kerja		-	-	-	9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern Pemerintahan Kabupaten Gowa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa serta seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gowa. Ruang lingkup PKPT terdiri dari pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi dan reviu. Selain itu Inspektorat Daerah juga menetapkan kegiatan non PKPT untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan non PKPT antara lain terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK RI serta pengawasan secara komprehensif.

Sampai dengan saat ini belum terdapat indikator kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum, namun untuk IKK telah diatur yakni itu Kapabilitas APIP. Selain itu, Inspektorat Daerah juga menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang secara umum merujuk pada Kementerian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan penilaian SAKIP Kabupaten Gowa menuju BB sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7.



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan s/d Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Penting

1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam Intern birokrasi maupun di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat).

Good governance menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya,



tata pemerintahan yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* (Dwiayanto, dkk, 2003).

UNDP dalam Sedarmayanti (2003), menjelaskan bahwa ketiga domain *good governance* (negara, swasta, dan masyarakat) menuntut hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip **good governance** sebagai berikut;

Participation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Rule of law, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

Transparency, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

Responsiveness, yaitu daya tanggap untuk senantiasa melayani setiap *stakeholders*.

Consensus orientation, yaitu merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

Effectiveness dan **efficiency**, yaitu proses yang RESPONSIF menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

Accountability, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

Strategic vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.



2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih banyaknya masalah hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam menjalankan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Manajemen Risiko Indeks

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana non alam dan sebagai keadaan darurat nasional. Hal tersebut diikuti dengan ditetapkannya berbagai aturan untuk menanggulangi bencana tersebut mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran tersebut dan menginstruksikan Pemerintah Daerah melakukan *refocusing* anggaran di APBD masing-masing dan fokus



dalam belanja penanganan Covid-19. Alokasi anggaran terkait Pandemi Covid-19 sangat besar, sehingga potensi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pun besar.

Untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan pemerintah, maka diperlukan suatu pedoman terkait pengelolaan risiko untuk menghadapi segala kemungkinan kejadian yang berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai oleh organisasi.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu manajemen yaitu Manajemen Risiko yang terdiri atas antara lain Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian. Manajemen Risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengambil peran penting dalam pengelolaan risiko. Peran APIP telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2014, yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi. APIP harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten serta hasil audit intern yang berkualitas.



Manajemen Risiko sebagai instrumen pengendalian, serta APIP yang menjalankan fungsi *consulting* dan *quality assurance* merupakan komponen penting dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam prosesnya, APIP harus melaksanakan fungsi *controlling* dalam penerapan manajemen risiko serta memperhatikan sistem pengendalian yang akan dilaksanakan dalam rangka meyakinkan proses bisnis telah dijalankan secara efektif. Sistem ini akan memperhatikan bagaimana mitigasi atau penanganan risiko melalui kegiatan/aktivitas untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko. Kegiatan pengendalian intern pemerintah yang sudah ada harus dipantau pelaksanaannya dalam rangka menentukan level risiko pada tahap analisis risiko.

Dengan diterapkannya manajemen risiko pada SKPD, diharapkan dapat mengawal tercapainya target sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi, meningkatkan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sumber Daya Inspektorat

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Keterampilan, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh aparat yang ada, secara signifikan akan menentukan kinerja pengawasan yang dilaksanakan.



Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 didukung oleh 52 orang (data per 31 Des 2021) Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.8
Klasifikasi Jabatan/Eselon dan Umur Pegawai

NO	JABATAN/ ESELON	USIA (TAHUN)							TOTAL
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50>	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Eselon III.a	-	-	1	-	-	2	2	5
3	Eselon IV.a	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Jabfung Auditor	-	1	2	6	3	8	3	23
5	Jabfung P2UPD	-	-	-	1	1	3	2	7
6	Jabfung Umum	1	-	2	3	5	3	1	15
TOTAL		1	1	5	10	9	16	9	52

Diagram 2.1
Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

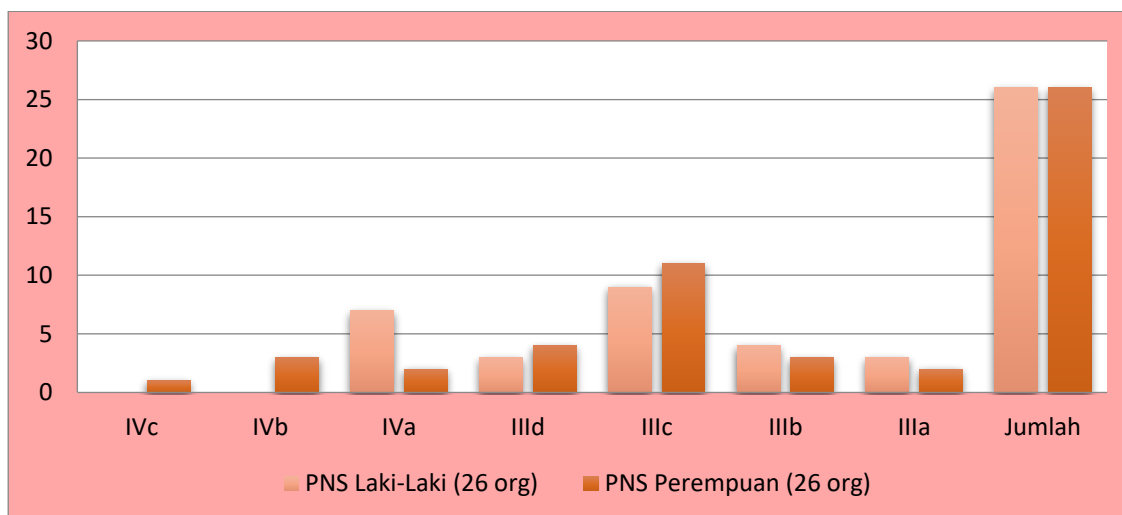
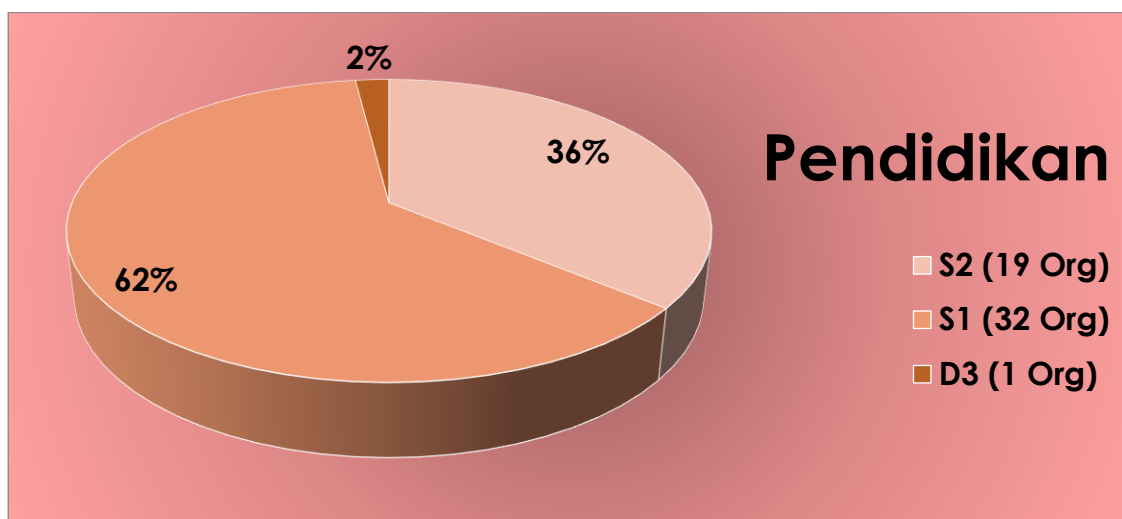


Diagram 2.2
Klasifikasi Tingkat Pendidikan



Dengan kondisi tersebut tergambar bahwa secara kuantitatif sumber daya aparatur Inspektorat belum memadai. Untuk memaksimalkan sumber daya tersebut maka sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk mengangkat kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi Pengawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan



Keuangan Daerah, juga merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Review terhadap rancangan awal RKPD serta usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:



Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	6.568.486.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gowa	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	6.568.486.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	66.309.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	66.309.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	56.917.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.917.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen	9.392.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.392.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	5.135.147.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	5.135.147.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	Jenis Gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya	9 jenis	4.796.315.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	4.796.315.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	Jumlah Penerima Honorarium Jasa Administrasi	56 Orang	327.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	327.340.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	11.492.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.492.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	576.151.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	576.151.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gowa	Jumlah Pakaian Dinas	110 Stel	84.630.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gowa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	84.630.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gowa	Jumlah Kepesertaan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	491.521.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gowa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	491.521.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	421.925.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	421.925.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5.901.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.901.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	3.920.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	3.920.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Bahan Logistik yang Diadakan	20 Jenis	41.528.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	41.528.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gowa	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	16650 Lembar	21.184.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gowa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.184.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Gowa	Jumlah Bahan Bacaan	6 Buah	86.310.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	86.310.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	Jumlah Kunjungan Tamu	14 Kali	28.864.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	28.864.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Peserta Rapat Jumlah rapat/ koordinasi yang diikuti	- 336 Orang - 12 kali	234.218.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.218.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	26 Unit	121.769.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	26 Unit	121.769.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	26 Unit	121.769.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	121.769.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Jaringan	103.487.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Jaringan	103.487.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gowa	Jumlah jaringan listrik/air yang tersedia	2 Jaringan	103.487.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jaringan	103.487.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	143.698.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	143.698.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	56.710.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	56.710.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah gedung terpelihara	1 Unit	57.013.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.013.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	29.975.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	29.975.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gowa	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	2.877.694.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gowa	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	2.877.694.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	2.006.125.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	2.006.125.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	12 LHP	272.278.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	272.278.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	15 LHP	309.122.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	309.122.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	Jumlah LHR Lap. Kinerja	3 LHR	129.373.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	129.373.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	Jumlah LHR Lap. Keuangan	19 LHR	576.673.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	576.673.000	
	Pengawasan Desa	Kab. Gowa	Jumlah LHP Desa	30 LHP	642.321.000	Pengawasan Desa	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	642.321.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (Internal/Eksternal)	2 Perjanjian	57.750.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	57.750.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	75 Reko mendasi	18.608.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	18.608.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	871.569.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	871.569.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu	52 LHP	871.569.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	871.569.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gowa	PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	65%	412.670.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gowa	PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	65%	412.670.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	412.670.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	412.670.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Pendampingan AFP (internal/eksternal)	2 Kali	15.221.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54 Perangkat Daerah	15.221.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	Jumlah unit kerja yang dilakukan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	54 Unit Kerja	142.916.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Perangkat Daerah	142.916.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	Jumlah unit kerja yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	9 Unit Kerja	254.533.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Kegiatan	254.533.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Sehingga, sampai saat ini Inspektorat Daerah belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan dari para stakeholder atau para pemangku kepentingan. Namun hal itu tidak serta merta mengurangi partisipasi masyarakat dalam ikut terlibat di program kerja yang Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa lakukan.

Pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa salah satu kegiatan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota ialah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, selain itu pada Permendagri No. 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 telah disebutkan salah satu fokus pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah ialah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat. Sehingga kedua aturan ini telah membuka ruang dan mengakomodir kepentingan stakeholder untuk ikut berpartisipasi pada program kerja terkait pengawasan dengan cara masyarakat dapat mengajukan laporan atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:



Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
					Tidak ada program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah khususnya pada tugas-tugas bidang pengawasan/ pemeriksaan



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Gowa, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, Untuk Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021-2026 adalah:

Masyarakat yang Unggul dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.

Masyarakat yang Tangguh dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas



Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan tata kelola pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dilakukan antara lain oleh Inspektorat Kabupaten. Dalam PP No. 79 tahun 2005 diatur bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten.

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*), serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya *Good Governance*, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini



terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat. Untuk Renja Inspektorat Kabupaten telah mengacu pada Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Gowa untuk Periode 2021-2026.

Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan misi dalam Renstra Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan fungsi pengawasan

Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gowa untuk Tahun 2023 diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2. Kegiatan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi

3. Sub Kegiatan

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- i. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- j. Kegiatan pendampingan dan asistensi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Gowa	100%	6.568.486.000	APBD	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Gowa	4 Dokumen	66.309.000	APBD	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	3 Dokumen	56.917.000	APBD	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	1 Laporan	9.392.000	APBD	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	Kab. Gowa	13 Dokumen	5.135.147.000	APBD	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	55 Orang/ bulan	4.796.315.000	APBD	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	9 Dokumen	327.340.000	APBD	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	1 Laporan	11.492.000	APBD	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	Kab. Gowa	2 Jenis	576.151.000	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gowa	110 Paket	84.630.000	APBD	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	55 Orang	491.521.000	APBD	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	Kab. Gowa	7 Jenis	421.925.000	APBD	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gowa	7 Paket	5.901.000	APBD	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gowa	14 Paket	3.920.000	APBD	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gowa	23 Paket	41.528.000	APBD	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gowa	3 Paket	21.184.000	APBD	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Gowa	6 Dokumen	86.310.000	APBD	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	14 Laporan	28.864.000	APBD	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	12 Laporan	234.218.000	APBD	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Kab. Gowa	26 Unit	121.769.000	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gowa	26 Unit	121.769.000	APBD	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	Kab. Gowa	2 Jaringan	103.487.000	APBD	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gowa	2 Jaringan	103.487.000	APBD	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kab. Gowa	3 Jenis	143.698.000	APBD	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gowa	5 Unit	56.710.000	APBD	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gowa	1 Unit	57.013.000	APBD	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Gowa	30 Unit	29.975.000	APBD	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	Kab. Gowa	95%	2.877.694.000	APBD	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	Kab. Gowa	7 Jenis	2.006.125.000	APBD	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	12 Laporan	272.278.000	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	15 Laporan	309.122.000	APBD	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	3 Laporan	129.373.000	APBD	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	19 Laporan	576.673.000	APBD	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Gowa	30 Laporan	642.321.000	APBD	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Gowa	2 Kesepakatan	57.750.000	APBD	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	4 Dokumen	18.608.000	APBD	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	Kab. Gowa	7 Jenis	871.569.000	APBD	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	52 Laporan	871.569.000	APBD	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	Kab. Gowa	65%	412.670.000	APBD	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	Kab. Gowa	3 Laporan	412.670.000	APBD	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	54 Perangkat Daerah	15.221.000	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	54 Perangkat Daerah	142.916.000	APBD	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	9 Kegiatan	254.533.000	APBD	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Renja berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja.

Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pendanaan indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada Renja tahun 2022 lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	6.568.486.000
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	66.309.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.917.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.392.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	5.135.147.000
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	4.796.315.000
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	327.340.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.492.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	576.151.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	84.630.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	491.521.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	421.925.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.901.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	3.920.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	41.528.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.184.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	86.310.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	28.864.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.218.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	26 Unit	121.769.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	121.769.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Jaringan	103.487.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jaringan	103.487.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	143.698.000
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	56.710.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.013.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	29.975.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	2.877.694.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	2.006.125.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	272.278.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	309.122.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	129.373.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	576.673.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	642.321.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	57.750.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	18.608.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	871.569.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	871.569.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	65%	412.670.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Money PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	412.670.000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54 Perangkat Daerah	15.221.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Perangkat Daerah	142.916.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Kegiatan	254.533.000



BAB V PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Terwujudnya Renja OPD merupakan prasyarat bagi setiap OPD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat untuk tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode 2021-2026.

Kaidah kaidah pelaksanaan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2023;
3. Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2023;
4. Para Kepala Sub Bagian membantu secara teknis Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2023;
5. Staf membantu Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga



diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh dalam proses kerja Inspektorat Kabupaten, pada sisi lain regulasi keuangan sangat kaku untuk meresponnya.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang selanjutnya dijabarkan sebagai tujuan dan sasaran di dalam Renja secara optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 6 Oktober 2022

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. ANDY AZIS, SH, M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19720902 199303 1 003